

ABSTRAK

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat basis perekonomian daerah. Konsekuensi penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang yang diikuti alokasi anggaran dan penyediaan barang publik pada pemerintah daerah. Meskipun daerah telah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, kenyataannya tingkat kemandirian daerah di bidang keuangan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Pemerintah daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat di tingkat lokal. Ketergantungan keuangan tersebut nampak dalam besarnya porsi dana perimbangan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan jenis data panel dalam bentuk tahunan. Data *time series* dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sedangkan data *cross section*-nya adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari penggabungan kedua data tersebut, diperoleh 280 observasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan model efek tetap.

Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: belanja daerah, produk domestik regional bruto, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah